

# ARAH KEBIJAKAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (ANALISIS TERHADAP HASIL SURVEI KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022)

Tri Hendra Wahyudi<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Ubaid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya

Email: [tri\\_hendra@ub.ac.id](mailto:tri_hendra@ub.ac.id)

<sup>2</sup>Univeristas Brawijaya

Email: [hasanubaid82@ub.ac.id](mailto:hasanubaid82@ub.ac.id)

## Abstrak

Hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya program yang diharapkan oleh masyarakat. Realisasi terhadap program tersebut menjadi suatu keharusan, sebab UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hal tersebut, serta merupakan cerminan dari demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pemerintahan Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil survei kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis riset *library research*. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi literatur, sementara metode analisisnya menggunakan analisis isi. Hasil riset memperlihatkan, pemerintah perlu merealisasikan program yang diharapkan masyarakat sebagai arah kebijakannya. Adapun program yang diharapkan tersebut berjumlah 10 yang memuat penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, perbaikan infrastruktur, pengadaan pupuk dan alat pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan, penyelesaian konflik pertambangan, peningkatan pelayanan publik, penataan untuk kebersihan lingkungan, pasokan listrik yang merata, serta perbaikan irigasi.

**Kata kunci:** Kebijakan, partisipasi masyarakat, pemerintahan Kabupaten Sumenep, survei kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022.

## Abstract

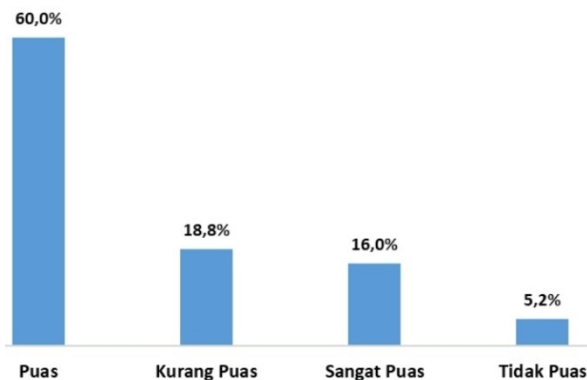
*The results of the Sumenep Regency government performance evaluation survey show that there is a program expected by the community. The realization of the program is a must, because Law Number 12 of 2011 has guaranteed it, and is a continuation of democracy. This article aims to analyze the policy direction of the Sumenep Regency government based on the results of the Sumenep Regency government performance survey in 2022. This article uses a qualitative approach with the type of library research research. The data collection method uses literature studies, while the analysis method uses content analysis. The results of this research show that the government needs to realize the programs that the community expects as a policy direction. The expected programs are 13 which include job creation, controlling the price of staples, improving infrastructure, procuring fertilizers and agricultural equipment, improving health services, resolving mining conflicts, improving public services, structuring for environmental cleanliness, equitable electricity supply, and improving irrigation.*

**Keywords:** Policy, community participation, Sumenep Regency government, Sumenep Regency government performance survey in 2022.

## Pendahuluan

Hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 melaporkan kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep dengan predikat baik. Masyarakat selaku responden sekaligus objek pelayanan publik pemerintahan menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep. Hal itu dibuktikan dengan aspek kepuasan terhadap kinerja Bupati Ahmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Kholifah yang bisa dilihat pada persentase diagram sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kepuasan Terhadap Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2022**



(Sumber: Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Diagram di atas menunjukkan persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sekitar 60,0%. Disusul dengan persepsi yang menyatakan kurang puas dengan persentase 18,8%. Pada peringkat selanjutnya adalah persepsi sangat puas

dengan persentase 16,0%. Sementara itu, persepsi tidak puas berada pada peringkat terbawah dengan perolehan persentase 5,2%.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan persepsi kepuasan masyarakat yang ditandai dengan keberhasilan realisasi program unggulan pemerintah kabupaten Sumenep di beberapa sektor yang bisa dilihat pada diagram di bawah berikut:

**Gambar 1.2 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang Dianggap Berhasil**



(Sumber: Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Sekalipun pemerintah Kabupaten Sumenep dikatakan berhasil dalam melaksanakan kinerjanya dengan baik, perihal demikian tidak menafikan perlunya perbaikan di beberap sektor. Masyarakat Sumenep melalui survei kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep juga mempersepsikan beberapa hal yang sesegera mungkin perlu diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 menyebutkan permasalahan-permasalahan mendesak yang berada di

Kabupaten Sumenep, di antaranya ialah sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Permasalahan Mendesak di Kabupaten Sumenep**



(Sumber: Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Selain mempersepsikan permasalahan yang harus segera diselesaikan, masyarakat Sumenep juga mengharapkan pemerintah kabupaten Sumenep agar merealisasikan beberapa program di bawah berikut:

**Gambar 1.4 Program yang Diharapkan**



(Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Dari hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022, terdapat sepuluh poin pokok yang diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. Sepuluh poin tersebut di antaranya mencakup penciptaan lapangan kerja

(45,3%), pengendalian harga bahan pokok (19,7%), perbaikan infrastruktur (12,2%), pengadaan pupuk dan alat pertanian (11,7%), peningkatan pelayanan kesehatan (4,0%), penyelesaian konflik pertambangan (2,5%), peningkatan pelayanan publik (2,2%), penataan untuk kebersihan lingkungan (1,5%), pasokan listrik yang merata (0,7%), serta perbaikan irigasi (0,3%).

Hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep di atas perlu dijadikan sebagai arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep ke depannya, mengingat Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi. Satu di antara beberapa asas yang mencerminkan demokrasi terkonfigurasi dalam kebijakan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Term ini, dalam istilah lain dikenal sebagai partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan menempati posisi yang teramat vital. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi acuan penentuan kebijakan secara khusus, dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Firmansyah dkk (2020), Cakra dan Sulistyawan (2020), Amin dkk (2020), dan Nureda (2020) tidak terbatas pada pengertian keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan,

tetapi juga kebijakan yang mencerminkan kehendak masyarakat.

Realisasi terhadap program yang diharapkan masyarakat di atas perlu untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat dalam suatu pemerintahan menempati posisi yang teramat fundamental. Sekurang-kurangnya, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, yang pada akhirnya memunculkan stabilitas sosial dan politik. Kepuasan dan kepercayaan juga akan mengantarkan masyarakat bersikap loyal dan patuh terhadap pemerintah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan pola ekuilibrium antara pemerintah dengan masyarakat.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan kerja riset yang diorientasikan untuk mendiskusikan perihal arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022. Berangkat dari inisiatif ini, penulis memformulasi rumusan masalah riset sebagai berikut: "Bagaimanakah arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022?".

Artikel ini nantinya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi literatur, sementara metode analisisnya menggunakan analisis isi.

### Metode Penelitian

Riset ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Instrumentasi riset kualitatif di sini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam perolehan data deskriptif berupa data tertulis terkait arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 (Murdiyanto, 2020).

Jenis penelitian ini terkategori sebagai *library research*. Data-data dan informasi-informasi penting yang menjadi objek penelitian ini diperoleh dari sumber yang terdapat di perpustakaan, bukan lapangan (Sari, 2020). Adapun data dan informasi yang dimaksud seputar data dan informasi kepustakaan seputar arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022.

Dalam ikhtiar memperoleh dan mengumpulkan data, riset ini menggunakan studi literatur. Data-data dan informasi-informasi seputar arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep

tahun 2022 terbatas kepada sumber data tertulis.

Pada persoalan analisis data, riset ini menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi di sini berusaha untuk menganalisis isi dari sumber data, baik sumber data primer ataupun sekunder. Sumber data primer berupa hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022. Adapun sumber data sekunder berupa informasi-informasi lain yang relevan dengan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022. Implementasi analisis isi di sini diarahkan untuk menyikap makna manifes dan laten (Martono, 2012) pada sumber data primer ataupun sekunder, lalu dilakukan analisis dan konstruksi, sehingga hasil dari riset tersebut bisa dipakai untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian yang terkategori kualitatif ini terdiri dari tiga tahapan penelitian (Murdiyanto, 2020), yakni pra penelitian, penelitian, dan pasca penelitian (analisis data). Pada tahapan pertama, yakni pra penelitian terdapat hal-hal yang penulis persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya ialah menyusun rancangan, memilih sumber-sumber kepustakaan, menjajaki dan menilai sumber kepustakaan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap kedua, yakni tahap penelitian, ada beberapa hal yang penulis persiapkan, seperti memahami latar penelitian, mengenali dan memahami data-data dan informasi-informasi yang

diteliti, serta akomodasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Pada tahap ketiga, yakni pasca penelitian (analisis data). Pada tahap ini, penulis melakukan telaah terhadap semua data yang diperoleh, menyusunnya dalam unit-unit, lalu memeriksa keabsahan data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kajian Pustaka**

#### **Analisis Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003), analisis kebijakan ialah kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam suatu diskursus politik. Dengan kata lain, analisis kebijakan ialah kegiatan memproduksi pengetahuan perihal dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan lebih bersifat kognitif, sementara produksi kebijakan lebih bersifat politis.

Winarno (2005) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas yang berkorelasi dengan investigasi dan deskripsi seputar konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Dari definisi yang dibuat oleh Winarno dapat dipahami jika analisis kebijakan ialah investigasi terapan yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pengetahuan mendalam terkait isu-isu yang tengah berkembang, sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif solutif yang lebih baik terkait isu-isu yang akan dianalisis.

Berdasarkan definisi di atas, analisis kebijakan ialah kegiatan investigasi terhadap konsekuensi-konsekuensi

kebijakan, sehingga bisa menawarkan alternatif solutif dari suatu kebijakan.

Dewasa ini, studi analisis kebijakan banyak mendapat perhatian, sebabnya ialah kemunculan produk kebijakan yang tidak memuaskan. Beberapa kebijakan yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dianggap kurang solutif, sehingga gagal menjadi alternatif untuk memecahkan permasalahan.

Lebih parah lagi, kemunculan kebijakan dari pembuat kebijakan dianggap tidak menyelesaikan masalah. Malahan, kebijakan tersebut justru membuat permasalahan-permasalahan baru. Problem demikian meniscayakan adanya disiplin independen yang secara khusus berfokus kepada analisis-analisis kebijakan, yang secara umum menilik dua hal, sebelum dan sesudah kebijakan dibuat.

Pada ranah sebelum kebijakan dibuat, analisis kebijakan berusaha untuk menjawab pertanyaan, kebijakan apakah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi?, apakah landasan atau instrumen yang tepat sehingga membuat produk kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi? Dari siapa dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat? Kapan dan di mana suatu kebijakan tepat diimplementasikan? (Subarsono, 2015).

Pada ranah sesudah kebijakan dibuat, analisis kebijakan berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah kebijakan tersebut efektif ketika

diimplementasikan? Faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan berhasil atau gagal saat diterapkan? (Subarsono, 2015).

Implementasi analisis kebijakan membutuhkan tiga hal pokok yang perlu diperhatikan. Di antaranya ialah: 1) Fokus utama yang berimplikasi dengan kesesuaian penjelasan kebijakan; 2) Sebab dan akibat yang akan ditimbulkan oleh kebijakan dengan memakai metodologi ilmiah; 3) Analisis dilaksanakan sebagai kegiatan pengembangan teori-teori general (Tangkilisan, 2003).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat lasa artikel ini berfokus kepada pembahasan seputar kebijakan. Oleh karena itulah, diskursus partisipasi masyarakat di sini secara spesifik mengarah kepada peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan.

Sebagai negara yang menganut demokrasi sebagai sistem bernegaranya, partisipasi masyarakat dalam suatu diskursus membuat kebijakan menduduki posisi yang teramat urgen. Partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan cerminan yang memanifestasikan kebijakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada konteks negara Indonesia, partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang ini sering dijadikan acuan pembuatan kebijakan yang

mengharuskan adanya partisipasi masyarakat di setiap pembuatan kebijakan.

Peran dan fungsi partisipasi masyarakat lebih lanjut diperluas cakupannya oleh Firmansyah dkk (2020), Cakra dan Sulistyawan (2020), Amin dkk (2020), dan Nureda (2020). Kesemua penulis ini menjelaskan partisipasi masyarakat yang tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, namun juga kebijakan yang mencerminkan kehendak masyarakat.

Dalam suatu proses produksi kebijakan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk diperhatikan, utamanya pada konteks negara yang bersistemkan demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen yang perlu dilakukan agar *good governance* terealisasi (Muhammadiyah, 2013).

Menurut Smith dan Ingram (dalam Muhammadiyah, 2013), penerapan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan memunculkan manfaat tersendiri bagi pemerintah. Manfaat tersebut salah satunya ialah penguatan dan peningkatan kapasitas institusi dalam membuat kebijakan yang selanjutnya berkorelasi terhadap peningkatan dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Para cendekia politik lain sekaliber Sample (1993), Weble, Kastenho, Renn (1995), dan Glicken (2000) yang dikutip oleh Muhammadiyah (2013) menerangkan adanya beberapa manfaat yang akan muncul jika saja prinsip partisipasi

masyarakat diimplementasikan sebagai ikhtiar pembuatan kebijakan. Beberapa manfaat tersebut, di antaranya ialah dapat memberikan kontribusi berupa pengoptimalan kompetensi para pembuat kebijakan melewati pengembangan produksi kebijakan yang berkualitas, memberi legitimasi yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan yang diproduksi, mampu mengoptimalkan akuntabilitas masyarakat melalui proses pemutusan kebijakan, serta dapat mendatangkan citra positif terhadap pemerintahan sebagai pemerintahan yang demokratis.

## **Pembahasan**

Hasil survei kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 memperlihatkan beberapa program yang diharapkan masyarakat. Program tersebut terdiri dari sepuluh program yang mencakup penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, perbaikan infrastruktur, pengadaan pupuk dan alat pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan, penyelesaian konflik pertambangan, peningkatan pelayanan publik, penataan untuk kebersihan lingkungan, pasokan listrik yang merata, serta perbaikan irigasi.

Sepuluh program di atas urgen untuk direalisasikan sebagai arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep ke depannya. Sepuluh program ini akan dijelaskan secara komprehensif pada pembahasan di bawah berikut.

## **Penciptaan Lapangan Kerja**

Pada posisi pertama program yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja. Posisi ini, sebagaimana dicatat dalam hasil evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 memperoleh hasil cukup tinggi, yakni 45,3%.

Data yang disampaikan oleh BPS Kabupaten Sumenep tahun 2022 memperlihatkan jumlah pengangguran masyarakat sekitar 9.153 (BPS Kabupaten Sumenep, 2022). Dibandingkan tahun sebelumnya, 2021 dan 2020, tingkat pengangguran pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran masyarakat Kabupaten Sumenep mencapai 15.630 orang (BPS Kabupaten Sumenep, 2021). Sementara itu, pada tahun 2020, angka pengangguran masyarakat Kabupaten Sumenep mencapai 18.953 orang (BPS Kabupaten Sumenep, 2021). Dengan demikian, selama tiga tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, dari jumlah 18.954 pada tahun 2020, 15.630 pada tahun 2021, menjadi 9.153 pada tahun 2022.

Disadur dari data yang disampaikan oleh BPS Jawa Timur, penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep berlangsung secara signifikan. Pada Agustus tahun 2020, tingkat pengangguran masyarakat Sumenep mencapai 2,84%. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran masyarakat menurun menjadi 2,31% (Nasrullah, 2022). Pada tahun 2022, jumlah pengangguran masyarakat mengalami penurunan

menjadi 1,36%. Pencapaian ini membuat Kabupaten Sumenep berhasil menjadi kabupaten dengan jumlah pengangguran terkecil di Jawa Timur (Yasik, 2022).

Meski bisa dibilang berhasil meminimalisir tingkat pengangguran, tetap saja pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam rangka mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan penciptaan lapangan kerja memiliki peran yang sangat urgen, tidak hanya sebagai penanggulangan angka pengangguran, tapi juga sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja sekurang-kurangnya juga berguna sebagai upaya meminimalisir angka kriminalitas, mengingat banyaknya kasus deviasi dan patologi sosial disebabkan oleh faktor ekonomi.

### **Pengendalian Harga Bahan Pokok**

Pengendalian harga bahan pokok menempati posisi kedua dari kebijakan yang diharapkan masyarakat. Pengendalian harga bahan pokok mendapat nilai 19,7%.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sumenep tahun 2022 (2022) diperlihatkan data kemiskinan daerah Kabupaten Sumenep selama lima tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017 sampai 2021. Data tersebut memperlihatkan terjadinya peningkatan kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan mencapai 19,62%. Pada tahun 2018, tingkat



kemiskinan bertambah menjadi 20,16%. Pada tahun 2019, jumlah kemiskinan menurun menjadi 19,48%. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2020 dan 2021, jumlah kemiskinan mengalami peningkatan secara berkala, 20,18% pada tahun 2020, sementara 20,51% pada tahun 2021.

Dari data di atas terlihat jika tahun 2021 merupakan tingkat tertinggi jumlah kemiskinan selama lima tahun terakhir. Data di atas barangkali bisa menjadi jawaban kenapa masyarakat lebih mempersepsikan penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga bahan pokok sebagai program yang paling banyak disuarakan. Alasannya tidak lain meningkatnya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Sumenep. Belum lagi faktor pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung kepada perekonomian dan pendapatan masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menginisiasi masyarakat agar pemerintah lebih berfokus untuk menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan dan pengendalian harga bahan pokok.

Pengendalian bahan pokok bisa dibilang penting untuk direalisasikan. Pengendalian bahan pokok dimaksudkan sebagai upaya pemerataan sumber daya bagi semua kalangan, khususnya kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Lebih-lebih, perekonomian dan pendapatan masyarakat belum sepenuhnya pulih disebabkan mewabahnya Pandemi Covid-19 yang

jelas-jelas berdampak secara langsung terhadap perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pengendalian bahan pokok bisa menjadi alternatif solutif dari pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketahanan bahan pokok.

### **Perbaikan Infrastruktur**

Perbaikan infrastruktur menempati urutan ketiga dari kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Para responden yang menyuarakan perbaikan infrastruktur mencapai 12,2% dari total keseluruhan responden (Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022).

Perbaikan infrastruktur tentu dapat mendatangkan sejumlah manfaat, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari Booklet Omnibus Law Cipta Kerja yang ditulis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Tt), salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia disebabkan oleh infrastruktur Indonesia yang kurang baik. Perbaikan infrastruktur tentu berguna untuk mendatangkan para investor agar melakukan investasi ke Indonesia, khususnya ke Sumenep. Kedatangan investor ke Indonesia setidaknya dapat membuka kran perekonomian dan pendapatan, baik pada level mikro ataupun makro.

Perbaikan dan pengoptimalan infrastruktur yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi juga dikonfirmasi

oleh sejumlah penulis. Para penulis sekaliber Sina dan Farida (2018), Weya dan Lubis (2022), Rasmusi dan Handayani (2018), Amalia (2019), Ariska, dkk (2016), Belwawin, dkk (2016), dan Prasetyo dan Widodo (2018).

Perbaikan dan pengoptimalan infrastruktur juga berimbas kepada indeks pembangunan manusia. Hal ini sempat dikonfirmasi oleh para peneliti sekaliber Safitri (2016), dan Brata (2016).

Perbaikan dan pengoptimalan infrastruktur juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Fadliyah dan Triani (2019).

Perbaikan dan pengoptimalan infrastruktur juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan. Hal itu disebabkan, dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur membutuhkan serapan tenaga kerja yang banyak. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan daya produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga dengan begini perkonomian dan pendapatan masyarakat dapat meningkat.

### **Pengadaan Pupuk dan Alat Pertanian**

Pengadaan pupuk dan alat pertanian menempati urutan keempat dari kebijakan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil survei kebijakan pemerintahan tahun 2022. Hasil survei menunjukkan, sekitar 11,7% responden mengharapkan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada pengadaan pupuk dan alat

pertanian (Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022).

Kebijakan yang diorientasikan untuk mengadakan pupuk dan alat pertanian sangat urgen direalisasikan, mengingat rata-rata mata pencarian penduduk masyarakat Sumenep ialah bertani. Selain itu, kebijakan pengadaan pupuk dan alat pertanian dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi, memaksimalkan pendapatan, serta mengoptimalkan ketahanan pangan.

Pengadaan pupuk dan alat pertanian yang berimplikasi kepada peningkatan produksi petani dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti Rachmadhan, dkk (2020). Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengadaan pupuk dan alat pertanian berdampak kepada peningkatan produksi petani.

Pengadaan pupuk dan alat pertanian juga berimplikasi kepada peningkatan pendapatan petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani pun dapat meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti Larasati, dkk (2022), Setiawati dan Yasa (2018). Kedua penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengadaan pupuk dan alat pertanian berdampak kepada pemaksimalan pendapatan petani.

Pengadaan pupuk dan alat pertanian yang berimplikasi kepada pengoptimalan ketahanan pangan dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti

Kapindo dan Santosa (2011). Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengadaan pupuk dan alat pertanian berdampak kepada peningkatan ketahanan pangan.

### **Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Peningkatan pelayanan kesehatan menempati urutan kelima dari kebijakan yang diharapkan masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kebijakan pemerintahan kabupaten Sumenep Tahun 2022. Hasil survei menunjukkan, sekitar 4.0% responden mengharapkan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kesehatan (Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022).

Pemerintah Kabupaten Sumenep sejatinya telah berhasil memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di bidang kesehatan. Hal itu bisa dilihat dari hasil survei terhadap kepuasan pelayanan Puskesmas dan RSUD Sumenep.

Dalam survei kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022, pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), mayoritas responden atau 88,3% menyatakan puas terhadap pelayanan Puskesmas. Sementara sisanya, yakni 11,7% menyatakan tidak puas terhadap pelayanan Puskesmas.

Sedangkan untuk pelayanan RSUD Sumenep, 89,1% responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan

RSUD Sumenep dan sisanya, yaitu 10,9% menyatakan tidak puas.

Meski masyarakat telah menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan kesehatan, hal itu tidak bisa menampik fakta adanya beberapa langkah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil survei, kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep yang berada pada sektor kesehatan ialah terus meningkatkan pelayanan dan mendorong pola dan gaya hidup sehat masyarakat Sumenep.

### **Penyelesaian Konflik Pertambangan**

Penyelesaian konflik pertambangan menempati urutan keenam dari kebijakan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil survei evaluasi kebijakan pemerintahan tahun 2022. Hasil survei menunjukkan, sekitar 2,5% responden mengharapkan kebijakan pemerintah yang berporos kepada konflik pertambangan (Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022).

Konflik pertambangan sendiri menjadi permasalahan mendesak yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Terbukti, dari hasil survei, sekitar 1,0% responden mengeluhkan konflik pertambangan.

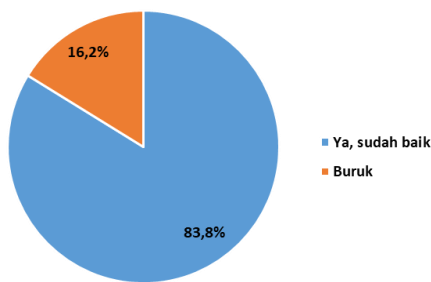
Tentu saja, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh pemerintah, apabila

konflik pertambangan diselesaikannya. Sekurang-kurangnya, penyelesaian konflik pertambangan dapat menyelesaikan permasalahan dan menjaga stabilitas sosial (Bintoro, 2016).

### Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep memperlihatkan predikat baik. Data hasil survei kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 menunjukkan mayoritas responden mempersepsikan kualitas pelayanan publik sudah baik.

Gambar 1.5 Kualitas Pelayanan Publik



(Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Pada gambar diatas terlihat bahwa 83,8% responden menyatakan sudah baik, sementara sisanya, yaitu 16,2% menyatakan buruk.

Pelayanan publik yang dianggap baik secara spesifik bisa dilihat dari gambar di bawah berikut:

Gambar 1.6 Bidang Pelayanan Publik yang Dianggap Baik



(Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022)

Masyarakat Kabupaten Sumenep yang menjadi responden survei evaluasi kebijakan pemerintahan Kabupaten Sumenep memersepsikan harapan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik sekitar 2,2%.

Menurut Maryam (2016), pelayanan publik yang baik merupakan cerminan dari *good governance*. Dengan kata lain, semakin baiknya suatu pelayanan publik di suatu daerah, hal itu semakin mencerminkan *good governance* di daerah tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin buruk suatu pelayanan publik di suatu daerah, semakin jauh daerah tersebut mencerminkan *good governance*.

### Penataan untuk Kebersihan Lingkungan

Penataan kebersihan lingkungan juga menempati kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Sekitar 1,5% dari keseluruhan responden dalam survei evaluasi kebijakan pemerintahan Kabupaten Sumenep mengharapkan adanya kebijakan yang secara khusus menangani penataan

untuk kebersihan lingkungan (Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022, BAPPEDA Sumenep dan LPPM UB, 2022).

### **Pasokan Listrik yang Merata**

Pada posisi kesembilan, masyarakat Kabupaten Sumenep menginginkan kebijakan yang mengarah kepada pasokan listrik yang merata. Sekitar 0,7% masyarakat Sumenep menginginkan kebijakan demikian kepada pemerintah.

Secara geografis, daerah-daerah di kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa kepulauan. Terpisah-pisah satu daerah dengan daerah lain berdampak kepada tidak meratanya pasokan listrik di beberapa daerah Kabupaten Sumenep. Itulah sebabnya, permasalahan tidak meratanya pasokan listrik di daerah Sumenep menjadi permasalahan mendesak. Sekitar 0,8% masyarakat Sumenep menyatakan kegelisahannya terkait pasokan listrik yang belum merata.

Padahal, pasokan listrik secara merata sangat dibutuhkan bagi masyarakat Sumenep. Listrik sendiri merupakan satu di antara beberapa infrastruktur yang kegunaannya tergolong vital. Betapa tidak, pemerataan pasokan listrik berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi (Sina dan Farida, 2018; Weya dan Lubis, 2022; Rusmusi dan Handayani, 2018; Amalia, 2018; Ariska, dkk, 2016; Belwawin dkk, 2016; Prasetyo dan Widodo, 2018), peningkatan indeks pembangunan manusia (Safitri, 2016;

Brata, 2016), serta kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Fadliyah dan Triani (2019).

### **Perbaikan Irigasi**

Arah kebijakan terakhir yang diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil survei evaluasi kebijakan pemerintahan tahun 2022 ialah perbaikan irigasi. Menurut hasil survei, perbaikan irigasi memperoleh nilai 0,3% dari total keseluruhan responden.

Sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung kepada mata pencarian sektor pertanian, perbaikan irigasi tentu sangat membantu masyarakat petani Kabupaten Sumenep. Perbaikan irigasi mendatangkan manfaat kepada sejumlah petani, salah satunya ialah meningkatkan pertumbuhan (Sulistiyono dkk, 2012; Kartika dan Kurniasih, 2021; Sulistiyono dan Indriati, 2011), meningkatkan hasil produksi (Sulistiyono dkk, 2012), serta kualitas tanah (Wijaya dkk, 2021).

### **Kesimpulan**

Arah kebijakan yang berbasis partisipasi masyarakat penting untuk direalisasikan sebagai upaya peningkatan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep. Hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep tahun 2022 memperlihatkan tiga belas program yang diharapkan masyarakat yang meliputi penciptaan lapangan kerja,

pengendalian harga bahan pokok, perbaikan infrastruktur, pengadaan pupuk dan alat pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan, penyelesaian konflik pertambangan, peningkatan pelayanan publik, penataan untuk kebersihan lingkungan, pasokan listrik yang merata, serta perbaikan irigasi. Tiga belas program ini bisa dijadikan dasar dan acuan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep mendatang.

### Saran

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Sumenep

tahun 2022, ada baiknya pemerintah Kabupaten Sumenep memfungsikan diri sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah tepat melaksanakan survei hasil evaluasi kinerja pemerintahannya. Jika perlu, survei tersebut dilakukan secara konsisten setiap tahunnya, tidak lain agar mempermudah pemerintah kabupaten Sumenep untuk mengevaluasi dan membenahi aspek yang perlu diperbaiki, serta mengambil langkah strategis dalam memformulasi kebijakan yang berbasis partisipasi masyarakat.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Martono, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### Jurnal:

- Firmansyah, Adithya Tri., Sinaga, Ema Sarila., Aisyah, Fenia Aurully. (2020). Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, 3(2), 131-140 <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Cakra, Putu Eka., Sulistyawan, Aditya Yuli. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-*

- Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, 2(2), 59-69  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Amin, Rizal Irfan., Dewi, Riska Ulfasari., W., Tegar Satrio. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita: Sebuah Kajian Legislative Intent. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 15(2), 190-209.
- Suntoro, Agus., Nureda, Kania Rahma. 2020. Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif Dalam Pembentukan Legislatif. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 109-139.
- Sari, Milya. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Muhammadiyah. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Jurnal Otoritas*, 3(1), 57-66.
- Rusmusi., Handayani, Dita Resmi. (2018). Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan, Air, dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(3), 1-13.
- Amalia, Dyah. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Pada 33 Provins di Indonesia Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1-13.
- Ariska, Yesi Indian., Yefriza., Yusnisa. (2016). Analisis Pengaruh Pemerintah Pengeluaran, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Baru Kabupaten Reformasi di Bengkulu Provinsi. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 6(3), 72-85.
- Belwawin, Edwin Arnolis., Franklin, Papia J.C., Takumansang, Esli D. (2016). Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Nain. *Spasial: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(1)  
<https://doi.org/10.35793/sp.v3i3.13196>
- Safitri, Intan. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 66-76.
- Fadliyah, Chairati., Triani, Mike. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 789-796.
- Rachmadhan, Aditya Arief., Kusnadi, Nunung., Adhi, Andriyono Kilat. (2020). Pengaruh Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Produksi Gula Kristal Putih Indonesia. *Jurnal AIP*, 8(1), 9-19, <http://dx.doi.org/10.25181/jaip.v8i1.1266>
- Larasati, Agnes., Antoni, Mirza., Lifianthi. (2022). Penggunaan Pupuk Subsidi Dalam Menekan Biaya Produksi dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani di

- Kecamatan Tanjung Lago. Fair Value: *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4463-4471, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Setiawati, Ni Made Ayu Sita., Yasa, I Gusti Wayan Murjasa. (2018). Pengaruh Subsidi Pupuk, Luas Lahan, Terhadap Biaya Produksi Pendapatan Petani Padi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal EP Unud*, 7(2), 271-299.
- Bintoro, Titis. (2016). Pengaruh Konflik Pertambangan Pasir Besi Kulon Progo Terhadap Keadaan Sosial Masyarakat Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Student UNY*, 1(9), 1-7.
- Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 1-18.
- Kartika, Melia Noor., Kurniasih, Budiastuti. (2021). Pengaruh Irigasi Tetes dan Mulsa Terhadap Pertumbuhan Tajuk Tomat (*Solanum Lycopersicum*) di Lahan Kering Gunung Kidul. *Jurnal Vegatalika*, 10(1), 31-43  
<https://doi.org/10.22146/veg.55590>
- Sulistiyono, Eko., Indriati. (2011). Pengaruh Frekuensi Irigasi dan Waktu Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kencur (*Kaempferia Galangal L.*) *Jurnal Agrovigor*, 4(2), 105-111.
- Sulistiyono, Eko., Suwarno., Lubis, Ikandar., Suhendar, Deni., (2012). Pengaruh Frekuensi Irigasi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Lima Galur Padi Sawah. *Jurnal Agrovigor*, 5(1), 1-8.

#### Dokumen Negera:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pedoman Gerakan Nasional Literasi Bangsa-Menciptakan Ekosistem Sekolah dan Masyarakat Berbudaya Baca-Tulis serta Cinta Sastra*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan Statistik Kabupaten Sumenep. (2021). *Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
- Badan Pengembangan Statistik Kabupaten Sumenep. (2022). *Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
- Badan Pengembangan Statistik Kabupaten Sumenep. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dan LPPM Universitas Brawijaya. (2022). *Survei Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dan LPPM Universitas Brawijaya
- Booklet Omnibus Law Cipta Kerja*. (Tt.). Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

#### Prosiding Seminar



Sina, Adolfina Idju., Farida, Lea Emilia. (2018). *Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur*. Prosiding: Seminar Nasional ASBIS. Politeknik Banjarmasin.

Weya, Ince., Lubis, Irsyad. (2022). *Pengaruh Pembangunan Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua*. Prosiding: Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK).

**Contoh Media Online:**

Nasrullah, Hanif. (2022). Pengangguran Terbuka di Sumenep Terendah Se-Jatim. *Antara Jatim*. <https://jatim.antaranews.com/berita/653921/pengangguran-terbuka-di-sumenep-terendah-se-jatim>

Yasik, Fer. (2022). Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep Turun. Pemerintah Kabupaten Sumenep. <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/angka-pengangguran-terbuka-kabupaten-sumenep-turun#:~:text=Bupati%20Sumenep%20Ra%20Achmad%20Fauzi,2020%20menca%20pai%20%2C84%20persen>